

BAB IV

HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN BARU IRAK PASCA PEMILU

Sebelum didudukinya Irak oleh militer AS, para politikus Washington telah menekankan bahwa pemerintahan Irak pasca tergulingnya Saddam harus selaras dengan Barat. Setelah didudukinya Irak pada bulan April tahun 2003, AS mengira dapat membentuk sebuah pemerintahan di Negeri 1001 Malam ini sesuai dengan kehendaknya. Dengan menempatkan seorang penguasa sipil AS untuk Irak, rezim Washington berusaha untuk mempengaruhi proses pembentukan pemerintahan baru di Irak. Campur tangan terang-terangan AS atas urusan dalam negeri Irak ini telah menimbulkan protes meluas dari rakyat negara ini, bahkan juga dari negara-negara lain. Akibatnya, Gedung Putih tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membiarkan pemerintahan Irak dipegang oleh orang Irak sendiri.

Bentuk sistem politik yang ingin dipaksakan AS kepada Irak didasarkan kepada pemisahan antara agama dan politik. Dalam sistem seperti ini, sebagaimana pemerintahan di negara-negara Barat, agama hanya terbatas pada amal ibadah individu dan tidak memiliki peran dalam menentukan haluan politik dan sosial masyarakat. Washington ingin menghapuskan Islam dari panggung politik dan sosial Irak, serta menggantikannya dengan nilai-nilai dan undang-undang Barat. Propaganda media massa Barat, khususnya AS, juga memperlihatkan tujuan yang ingin dicapai oleh AS ini. Para pejabat Gedung Putih telah mengumumkan bahwa mereka berniat untuk menjadikan pemerintahan baru Irak sebagai model bagi negara-negara di Timur Tengah lainnya. Dengan cara ini,

mereka berharap pelaksanaan program Timur Tengah Raya dapat dipercepat. Berdasarkan semua alasan tadi, bisa dipahami mengapa AS sangat memaksakan diberlakukannya sistem pemerintahan sekuler di Irak.¹

A. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP INVASI

Awalnya, Washington berharap bahwa melalui pemilu 30 Januari lalu, pemerintahan Irak yang diinginkannya akan bisa terwujud, dan melalui pemerintahan baru ini, AS dapat menghapus wajah negatifnya di tengah opini dunia. Para pejabat AS memprediksikan bahwa kelompok sekuler yang pro-AS berhasil menang dalam pemilu sehingga langkah untuk membentuk sebuah pemerintahan sekuler menjadi semakin ringan. Namun, harapan dan prediksi AS ini tidak terealisasi karena sebagian besar orang-orang yang terpilih dalam pemilu itu adalah orang-orang yang setia kepada nilai-nilai Islam.

Pada dasarnya, Islam memiliki program-program pada semua sisi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dalam Al Quran dan Hadis, kita dapat menemukan berbagai bimbingan dan petunjuk mengenai cara-cara mengatur masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, agama yang lengkap dan selalu selaras dengan perkembangan zaman ini tidak akan bisa secara mudah dihapuskan dari sebuah bangsa muslim. Islam selama berabad-abad menunjukkan bahwa selain mampu memainkan peran dalam masyarakat dan pemerintahan, juga mampu menjadi landasan bagi berdirinya peradaban yang besar.

¹ Abdul Kohar Mudzakir, "Sistem Pemerintahan Irak Masa Depan", *Kompas*, 24 Desember 2004.

Secara tidak langsung dengan pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik ini menghambat adanya intervensi Amerika Serikat terhadap pemerintahan baru di Irak sesudah maupun sebelum Pemilu karena sikap masyarakat Irak khususnya kelompok Syiah yang mempunyai sifat primordialisme yang kuat, dalam sistem distrik pemilih lebih hubungan dengan calon lebih kuat sehingga pengaruh dan posisi poros *marja'iyyat* (otoritas keagamaan) yang berada pada Ayatullah Ali Sistani dan *Hauzah Ilmiyah* (kalangan pesantren) di Najaf mempunyai kekuatan yang begitu luas untuk mendapatkan dukungan, bukan hanya dari orang Syiah sebagai mayoritas (65%), bahkan dari orang Sunni di daerah-daerah etnis Kurdi. Kebijakan-kebijakan *marjaiyyat* sejauh ini begitu penting dipertimbangkan Amerika dan publik, mulai dari tuntutan islamisasi UUD itu sendiri sampai diselenggarakannya pemilu pada tahun ini.

Tampak benturan Amerika dengan rakyat semakin tajam. Akan sulit sekali mencari celah kompromi. Sebaliknya, tidak jauh kemungkinan ambisi Amerika lagi-lagi nihil. Politik militerismenya sampai kini hanya mengulang kegagalan. Seperti juga di Afghanistan, Irak malah jadi lumpur hidup bagi Amerika yang kian hari kian menelan.

Kegagalan ini lebih dikarenakan kekuatan rakyat yang berbasis pada *marjaiyyat* Ayatullah Sistani dan *Hauzah Ilmiyah* sangat kuat oleh karena itu dengan kebijakan Sistani untuk melaksanakan pemilu sebagai salah satu jalan untuk mengakhiri campur tangan Amerika dalam pemerintahan di Irak mendapat dukungan yang besar oleh masyarakat Irak khususnya kelompok Syiah

Tanggal 20 Maret 2002 pada pukul 05.35 waktu Baghdad, hanya sekitar 95 menit batas akhir ultimatum 48 jam yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS) bagi Presiden Irak Saddam Hussein untuk mundur dari jabatannya, peluru kendali penjelajah Tomahawk menghantam sasaran-sasaran tertentu di Kota Irak. Perang dilancarkan AS dan Inggris terhadap dimulai. Sebagian besar negara di dunia tidak habis pikir mengapa AS memaksa akan perang itu dilakukan, padahal sebagian besar anggota DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menentangnya.

Bahkan, tiga dari lima negara anggota tetap DK PBB bersikeras menentang kehendak AS untuk berperang dengan Irak. Perancis, Rusia, dan Cina menganggap memerangi Irak untuk melucuti persenjataan pemusnah massalnya adalah suatu tindakan yang berlebihan. Karena peluang untuk melucuti persenjataan Irak bisa dilakukan lewat cara-cara damai. Satu-satunya anggota tetap DK PBB yang mendukung AS hanya Inggris.

Bahkan, Jerman, yang selama ini dianggap sebagai sekutu dekat AS pun menentang perang terhadap Irak, dan bergabung bersama dengan Perancis, Rusia, Cina, dan beberapa anggota DK PBB menentang kehendak AS untuk memerangi Irak. Sama seperti Perancis, Rusia, dan Cina, Jerman pun menegaskan bahwa perang bukanlah jalan yang terbaik untuk melucuti persenjataan Irak.

Semula memang Irak menunjukkan keengganannya untuk bekerja sama dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB yang dikirim PBB untuk memeriksa apakah Irak masih memiliki persenjataan pemusnah massal. Setelah AS dan Inggris mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke kawasan Teluk Irak

menunjukkan kerja samanya dengan mengizinkan tim PBB bekerja dengan leluasa.²

Namun, kemajuan yang diperoleh Tim Pemeriksa Persenjataan PBB dianggap AS tidak signifikan dan sudah sangat terlambat. Memang tim PBB tidak menemukan persenjataan pemusnah massal yang berhulu ledak kimia atau biologi di Irak, tetapi AS menganggapnya itu karena Irak pandai menyembunyikannya. Dan, anggapan AS itu seakan mendapatkan pembenaran, ketika Tim Pemeriksa Persenjataan PBB menemukan bahwa Irak masih punya rudal Al Samoud II yang daya jelajahnya melampaui batas yang ditetapkan oleh PBB, yakni di atas 150 kilometer.

Pada awalnya AS masih berharap bahwa kehendaknya untuk menyerang Irak mendapatkan persetujuan dari anggota DK PBB.³ Sebab itu, AS berupaya menyusun resolusi kedua DK PBB yang isinya membuka peluang untuk melakukan perang terhadap Irak jika negara itu tidak mau bekerja sama secara penuh dengan Tim Pemeriksa Persenjataan PBB.

Untuk itu, perlu diberikan batas waktu kepada Irak untuk memenuhi tuntutan perlucutan persenjataannya. Dan jika Irak melanggar batas waktu yang diberikan kepadanya maka perang terhadap Irak dapat dilakukan. Sayangnya, sebagian besar anggota DK PBB tidak memperlihatkan dukungan bagi resolusi kedua yang diupayakan AS. Mereka menganggap Resolusi DK PBB yang berisi ancaman bahwa Irak akan menghadapi implikasi serius jika tidak mau bekerja sama dengan tim PBB, sudah cukup. Untuk bisa meloloskan resolusi tersebut, AS

² *Koran Tempo*, Kamis, 20 Maret 2003, hal 7.

³ http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php.

memerlukan dukungan sembilan dari lima belas anggota DK PBB, karena itu sibuklah AS melakukan lobi.

Namun, upaya AS itu tampaknya sulit dicapai, karena Perancis dan Rusia yang merupakan anggota tetap mengancam akan menggunakan hak vetonya. Dengan menggunakan hak veto itu, Perancis atau Rusia bisa membatalkan dikeluarkannya resolusi kedua yang diupayakan AS, walaupun sembilan anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut.

Boyce pun berkali-kali menegaskan, keputusan itu tidak diambil secara unilateral, melainkan trilateral, karena mendapat dukungan dari Inggris dan Spanyol. Selain itu, AS mengklaim mendapat dukungan setidaknya dari 28 negara, yaitu Afganistan, Albania, dan Australia. Selain itu, Azerbaijan, Kolombia, Ceko, Denmark, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Georgia, Hongaria, Islandia, Italia, Jepang, Korea, Latvia, Lituania, Macedonia, Belanda, Nikaragua, Filipina, Polandia, Rumania, Slovakia, Turki, dan Uzbekistan. Selain itu, AS menyatakan masih ada 15 negara lain yang siap bekerja sama.⁴

Kebijakan itu diambil seiring dengan kesadaran AS akan jaringan terorisme Internasional yang tumbuh dan berkembang dengan subur. Dalam kaca mata AS, jaringan itu tidak lagi enggan untuk menggunakan kekerasan dan senjata yang menghancurkan dalam skala sangat besar. Umumnya, jaringan terorisme semacam ini berada, bahkan "melekat" pada satu negara yang "kebetulan" memiliki agenda politik yang tumpang tindih dengan agenda teroris. Selain itu, terorisme tumbuh di satu negara yang tidak mampu mencegah teroris

⁴ http://www.kompas.com/kompas_cetak/0303/03/Edisi/030328.htm

menggunakan wilayahnya sebagai basis, sekadar "panggung pementasan", atau tempat berlindung.

Dan dengan teori itu, sangat bisa dimengerti jika kemudian AS memasukkan Irak sebagai kasus utama. AS dengan tegas menganggap Irak, khususnya Saddam Hussein adalah ancaman paling berbahaya di dunia. Lebih dari itu, AS menganggap Saddam Hussein adalah teroris internasional yang setiap saat siap menggunakan senjata pemusnah massalnya.

Akhirnya rezim Saddam ditumbangkan oleh serangan AS dan Inggris ke Irak pada bulan April 2003, rakyat negara ini, khususnya kaum Syiah telah terselamatkan dari kejahatan dan kebrutalan rezim ini. Tetapi tumbangannya Saddam dan pemerintahan despotiknya diikuti pula oleh masalah lain yaitu pendudukan Irak oleh AS. Dengan kata lain, rakyat Irak yang selamat dari cengkeraman penguasa diktator, kini terperosok pula ke dalam perangkap penjajah. Memang benar bahwa tentara AS menduduki Irak dengan alasan untuk menegakkan demokrasi di negara ini. Akan tetapi semua orang tahu bahwa sebenarnya Washington sedang merampok seluruh kekayaan Irak dan menancapkan kekuasaannya lebih kuat lagi di kawasan ini.

Bisa dipastikan bahwa tujuan utama AS menyerang Irak ialah untuk menguasai dan merampok sumber minyak negara ini. Satu-satunya cara untuk mencegah tragedi ini ialah dengan menyadarkan rakyat Irak dan mengembalikan hak mereka untuk menentukan nasib serta masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu partai Aliansi Irak Bersatu dengan diwakili pemimpin tertinggi ulama

mengurangi peran Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan menjadi kekuatan yang akomodatif terhadap pemerintahan baru Irak.

Hal ini penting mengingat agenda utama kelompok Syiah adalah menghentikan pendudukan AS atas Irak dengan konsekuensi bahwa pasukan Amerika Serikat harus ditarik dari wilayah Irak. Meskipun pemimpin kelompok Syiah Ayatollah Ali Al-Sistani akan menerima keputusan penarikan pasukan AS bertahap, namun Partai Aliansi Irak Bersatu menekankan bahwa penarikan pasukan Amerika Serikat selambat-lambatnya 18 bulan setelah diadakan pemilu.⁵

B. Kepentingan Kelompok Syiah, Kelompok Kurdi, dan Kelompok Sunni Dalam Pembentukan Pemerintahan Baru Di Irak

Pemilu Irak banyak diikuti banyak kelompok atau parpol. Namun sebenarnya terdapat tiga kekuatan yang sedang bersaing untuk merebut posisi politik tertinggi, yakni kekuatan Syiah, Sunni, dan Kurdi. Kekuatan kelompok Syiah berada di bawah payung Aliansi Irak Bersatu pimpinan Ayatollah Ali Husseini al-Sistani.⁶

Dari tiga kekuatan tersebut, kelompok Syiah dan Kurdi menyambut pemilu dengan antusias sementara kelompok Sunni justru menginginkan penundaan pemilu dan menyerukan para pengikutnya untuk memboikot pemilu. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan bagi kelompok Sunni untuk merapatkan barisan demi mengantisipasi apabila kelompok Syiah memenangkan pemilu.

⁵ Edy A Effendi, "Rasionalitas Syiah Coba Hadang Amerika", *Media Indonesia*, Minggu, 20 April 2003

⁶ Abdul Khabir Mardiyah, *Memorandum Politik Irak*, Jakarta: Yayasan Kemanusiaan, 2003, hal. 22-23

Perbedaan kepentingan dan perspektif berkaitan dengan pemilu mewarnai persaingan antar kelompok di Irak. Dari perspektif kelompok Syiah, khususnya yang diwakili oleh Ayatollah Ali Husseini al-Sistani, beryakinan bahwa satu-satunya cara bagi bangsa Irak untuk memiliki pemerintahan yang legitimate serta jalan untuk mengakhiri pendudukan Amerika Serikat di Irak adalah melalui pemilihan nasional. Keyakinan al-Sistani tersebut merefleksikan keinginan kuat kelompok Syiah Irak untuk mendominasi pemerintahan Irak pasca rezim Baath. Sebagai kelompok Mayoritas di Irak, muslim Syiah mengalami marginalisasi politik hampir seratus tahun. Oleh karena itu kelompok Syiah tidak menyia-nyikan kesempatan pemilu kali ini dan berupaya sekuat tenaga menyakinkan pendukungnya untuk menggunakan hak politiknya.

Sehingga pada saat hasil pemilu diumumkan akhirnya kelompok Syiah pimpinan Ayatollah Ali Husseini Al-Sistani meraih suara terbanyak yaitu meraih 4,075 juta suara (48 persen) dari total 8,5 juta pemilih, sementara Kurdi merebut 2,175 juta suara (26 persen) dan Sunni 1,5 juta suara (14 persen).

Setelah melalui proses dan negosiasi yang cukup alot, akhirnya Dewan Nasional Irak hasil pemilihan umum 30 Januari lalu mulai menjalankan tugasnya, dengan terpilihnya Hajim Al-Hasani dari kelompok muslim Sunni sebagai ketua Dewan. Dalam menjalankan tugasnya Al-Hasani dibantu oleh dua wakil ketua yang masing-masing berasal dari kelompok Syiah dan Kurdi.

Berdasarkan kesepakatan, Jalal Talebani, salah seorang pemimpin Kurdi Irak ditunjuk sebagai Presiden. Sedangkan Adel Abdul Mahdi, salah satu

Syiah dan Ghazi Al-Yazar dari kelompok Sunni terpilih sebagai wakil presiden pertama dan kedua. Ketiga tokoh membentuk sebuah Dewan Kepresidenan Irak yang menjadi simbol kedaulatan Irak yang baru.

Salah satu tugas Dewan Kepresidenan adalah menunjuk seorang perdana menteri untuk membentuk sebuah pemerintahan. Dewan ini menetapkan Ibrahim Jafari dari Aliansi Irak Bersatu sebagai perdana menteri Irak yang baru. Kini, setelah Dewan Nasional dan Dewan Kepresidenan terbentuk, Jafari memikul beban membentuk pemerintahan baru yang tentunya juga menyertakan berbagai faksi Irak di dalamnya.

Pembentukan pemerintahan baru yang didasarkan pada prinsip *power sharing* atau pembagian kekuasaan berdasarkan faksi-faksi itu adalah hal yang sangat penting bagi kelancaran pembentukan pemerintahan baru Irak. Bagaimanapun juga, Irak adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku, madzhab, dan kepentingan.

Parahnya lagi, selama beberapa dekade bangsa ini menjalani kehidupan bernegara dalam situasi yang serba represif. Saat itu, pemerintahan dikuasai oleh Saddam yang lebih banyak memanfaatkan orang-orang Sunni sebagai pembantunya. Padahal, kaum Sunni adalah kelompok minoritas di Irak

Hal-hal seperti inilah yang menjadi bahan perhatian serius kelompok-kelompok utama di Irak. Mereka sepakat bahwa situasi politik di Irak selama sangat tidak sehat. Setelah mengalami kelaputan kelaputan politik di Irak ditetapi

lewat pemilu Dewan Nasional tanggal 30 Januari lalu, partai-partai pemenang pemilu sangat intensif melakukan berbagai lobi politik satu sama lain. Karenanya, sebelum sidang Dewan Nasional secara resmi diselenggarakan, mereka sudah mampu mencapai kesepakatan terkait orang-orang yang akan menempati berbagai jabatan penting. Setelah inipun, kebijakan pembagian jabatan berdasarkan kelompok itu masih akan tetap dijalankan oleh Ibrahim Ja'fari saat menunjuk anggota kabinetnya.

Dengan kebijakan seperti ini, pemerintahan baru Irak kemungkinan besar akan mampu melewati rintangan besar pertama mereka. Akan tetapi, jika inipun bisa dilewati, masih ada sejumlah rintangan besar yang harus dilewati. Tokoh-tokoh dan para pengamat politik dalam negeri Irak sudah membuat daftar masalah tersebut yang sebagiannya termasuk masalah-masalah yang sangat jelas terlihat. Mereka melihat masalah keamanan dalam negeri dan rekonstruksi negara yang porak-poranda akibat pemerintahan represif Saddam serta aksi pendudukan yang berkepanjangan sebagai problema utama yang dihadapi rakyat Irak.

Semua pengamat sepakat bahwa menjadi tugas pemerintahan Irak untuk membuat skala prioritas. Talebani pada pidato sambutannya setelah terpilih sebagai presiden menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah baru Irak adalah mewujudkan persatuan nasional dan menciptakan suasana kehidupan bertetangga secara baik dengan negara-negara sekitar.

Sedangkan Ja'fari mengemukakan sejumlah agenda pemerintahannya yang

independensi nasional, penentuan jadwal penarikan tentara pendudukan, perang melawan korupsi, dan pembersihan atas sisa-sisa anggota Partai Ba'ats.

Kemudian, bagaimana dengan rakyat Irak sendiri. Demonstrasi besar-besaran warga Irak yang digelar pada tanggal 9 April di kota Baghdad menunjukkan bahwa ada sejumlah aspirasi mereka yang ingin segera terwujud. Tuntutan yang paling bergaung adalah penarikan segera tentara pendudukan dari negara mereka.

Ini memang tuntutan yang sangat wajar. Dua tahun masa pendudukan adalah masa penuh ketegangan dan ketidakamanan. Selama masa ini, lebih dari 100.000 warga sipil Irak tewas. Karenanya, sangat wajar jika opini publik Irak sepakat menyebut aksi pendudukan sebagai biang segala tragedi yang menimpa mereka.

Tuntutan mereka itu juga sebenarnya memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, tentara multinasional yang menduduki Irak harus secepatnya keluar dari negara itu setelah segala proses politik di dalam negeri Irak mencapai hasilnya. Kini, organ-organ pemerintahan penting telah terbentuk. Dengan parameter apapun, semua sepakat bahwa proses-proses politik di dalam negeri Irak memang sudah mencapai hasil yang diharapkan.

Akan tetapi, tuntutan ini sepertinya diabaikan begitu saja oleh AS. Mereka masih bersikeras untuk tetap berada di Irak dengan alasan masih berkeliarannya

kelompok-kelompok teroris. Hal itu mereka katakan dengan mengajukan bukti masih terus terjadinya aksi-aksi teroris berupa peledakan bom dan serangan terhadap tentara pendudukan AS. Akan tetapi, mestinya argumen ini tidak ada satupun klausul yang memberikan legitimasi kepada AS untuk tetap menduduki Irak dengan alasan apapun jika pemerintahan baru di Negeri 1001 Malam itu telah terbentuk. Segala hal yang berlangsung di negara itu, termasuk masalah keamanan dalam negeri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan baru yang sah.

Hal-hal lainnya yang selama ini menjadi aspirasi rakyat Irak, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Talebani, adalah kehidupan bertetangga yang baik dengan negara-negara sekitar Irak. Selama Saddam berkuasa, Iran dan Suriah adalah dua negara tetangga yang dimusuhi oleh Baghdad. Padahal, secara kultural, rakyat ketiga negara itu sangatlah dekat, karena bagaimanapun juga, mayoritas rakyat di Iran, Irak, dan Suriah bermadzhab Syiah.

Anehnya, permusuhan Saddam dengan Suriah dan Iran seperti itu sangat mendapatkan dukungan dari AS, dan sikap ini terus diambil AS meskipun Saddam telah ditumbangkan dari kekuasaannya.

Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semua pangkal problema dan tantangan yang dihadapi oleh rakyat dan pemerintah baru Irak terkait dengan ambisi-ambisi AS di Irak, dan kawasan Timur Tengah secara umum. AS memang disebut-sebut telah mengalami kekalahan telak di Irak. Lebih dari 200 juta dolar telah dikemb...

Lebih dari 1.500 nyawa personil militernya melayang dengan sia-sia. Akan tetapi, pemerintahan yang terbentuk ternyata jauh dari harapan Washington. AS jelas akan memainkan kartu-kartu lainnya, di antaranya dengan mengganti Dubes John Negroponte dengan Zulma Khalilzad. Hal-hal seperti ini harus terus diwaspadai oleh rakyat dan pemerintahan Irak.

Mengingat besarnya peranan Islam dalam kehidupan kemasyarakatan dan budaya di Irak di kalangan suku Kurdi, kaum Sunni, dan lebih-lebih di kalangan kaum Syiah dengan peran ulamanya yang sentral dan dominan tampaknya Irak ke depan akan memilih bentuk negara Islam yang demokratis dan akomodatif terhadap nilai-nilai universal.

Dalam pentas politik telah terjadi pula hubungan kurang harmonis di antara para elite politik, khususnya antara kubu Arab Sunni dan Aliansi Irak Bersatu yang didominasi Arab Syiah akibat tidak puasny kubu Sunni atas cara pembentukan pemerintah baru pimpinan PM Jaafari.

Skenarionya mengulang kasus pemilihan ketua parlemen, ketika Aliansi Irak Bersatu memaksakan calonnya, Hajim al-Hassani, dari Arab Sunni untuk menjadi ketua parlemen dan mendepak calon yang diajukan kalangan Arab Sunni sendiri, yaitu Maan al-Jabbouri.

PM Jaafari kini juga dituduh memaksakan calon-calonnya untuk duduk dalam kabinet yang dipimpinnya dengan memaksakan

lainnya. Para politikus Arab Sunni pun merasa dikecewakan dua kali, yaitu kasus pemilihan ketua parlemen dan pembentukan pemerintah baru sementara.

Harapan besar yang tercurahkan pada pemerintah baru itu, yang dilukiskan sebagai pemerintah terpilih pertama secara demokratis di Irak sejak lebih dari 50 tahun, segera buyar pula.

Seperti dimaklumi bahwa pemerintah baru Irak itu lahir setelah terjadi perdebatan alot di antara partai pemenang pemilu lalu, yaitu Aliansi Irak Bersatu (146 kursi), Koalisi Kurdistan (77 kursi), dan Daftar Irak pimpinan mantan PM Iyad Allawi (40 kursi). Sejumlah partai Sunni kemudian turut terlibat dalam perdebatan beberapa pekan terakhir ini.

Maka, gambaran utama yang menjadi sorotan dalam proses pembentukan pemerintah baru itu adalah kesulitan pembentukan pemerintah tersebut yang mencerminkan potret negeri itu sejak invasi AS ke Irak tahun 2003. Yakni sebuah potret tentang beragamnya persepsi, perbedaan sikap, berubah-ubahnya koalisi dan kepentingan, serta campur tangan asing, khususnya AS, dalam mengendalikan proses politik dan keamanan.

PM Jaafari dan Aliansi Irak Bersatu ternyata tidak mampu mengatasi perbedaan tersebut. Hal itu terlihat bahwa pemerintah baru tersebut dibentuk dengan setengah hati karena gagalnya PM Jaafari menentukan pejabat menteri pada lima kementerian itu. Masalahnya lebih rumit setelah Front Kekuatan Arab Sunni dan Dewan Dialog Nasional menarik para kandidat menterinya sebagai

protes terhadap sikap tidak komitmen PM Jaafari atas kesepakatan dengan mereka.

Ironisnya, kini dipaksakan diumumkan susunan kabinet yang parsial setelah terjadi polemik dan perdebatan cukup lama. Lebih dari itu, menurut Wakil Presiden Ghazi al-Yawar, jabatan kabinet yang mencapai 37 jabatan dan terbagi atas dasar etnis dan mazhab agama merupakan pembagian setengah hati dan tidak mencerminkan keadilan.

Bagian Arab Sunni seharusnya tidak kurang dari 12 menteri mengingat jumlah Arab Sunni adalah sepertiga penduduk Irak. Namun, ternyata Arab Sunni hanya mendapat jatah tujuh kursi kabinet. Bagian Syiah Arab seharusnya 17 kursi kabinet dengan jumlah Arab Syiah 47 persen dari penduduk Irak, tetapi Arab Syiah hanya mendapat 12 kursi kabinet dan ditambah jabatan PM yang memiliki kekuasaan terbesar dalam sistem politik di Irak pascatumbangnya rezim Saddam Hussein.

Adapun kaum Kurdi yang merupakan 16 persen dari penduduk Irak yang seharusnya mendapat jatah tidak lebih dari enam menteri, tetapi memperoleh delapan jabatan menteri, termasuk jabatan menteri strategis seperti menteri luar negeri yang dijabat Hoshyar Zebari, ditambah jabatan presiden yang dijabat Jalal Talabani. Jika tidak segera ada solusinya, bukan hanya berakibat situasi keamanan semakin buruk, tetapi juga akan terjadi perpecahan yang kian mendalam di antara tokoh-tokoh dan kekuatan-kekuatan politik yang telah menerima peranan politik di